

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PASAR IKAN BANUA LIMA)

Nia Ramadani¹, M. Husaini², Gusti Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: nramadani708@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah pada pasar merupakan suatu kegiatan yang melakukan penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan sampah secara terintegrasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan masih kurangnya tenaga kebersihan pada Pasar Ikan Banua Lima, yang mana lingkungan pasar sangat luas yang tidak memungkinkan hanya 1 orang saja petugas kebersihannya, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan para pedagang terhadap kebersihan lingkungan pasar. Berdasarkan hal diatas, penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Dalam pengumpulan data digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sepuluh orang menjadi sumber data yang digunakan dalam proses *purposive sampling*. Setelah pengumpulan, data *collection*, data *display*, data *condensation*, dan *conclusion: drawing/verifying* untuk menganalisis. Hasil penelitian yang mencakup 15 indikator dari 6 subvariabel menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kurang baik. Tiga indikator cukup baik dan dua belas indikator kurang baik dari lima belas indikator. Pelaksanaan yang cukup baik seperti koordinasi, kerjasama, dan kondisi politik. Sedangkan untuk yang masih kurang baik diantaranya ukuran dan tujuan keberhasilan, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran (finansial), ketegasan, ketat, dan keras, kebutuhan, keinginan, dan permasalahan, serta kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Dari faktor pendukung yaitu terjalinnya sinergi dan kesepahaman yang baik dan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya pengawasan terhadap lingkungan pasar dan kurangnya pemahaman ekonomi dan partisipasi sosial. Agar meningkatkan keberhasilan suatu pengelolaan sampah di Pasar, disarankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, agar dapat memberikan peningkatan pengawasan terkait keberlangsungan di Pasar Ikan Banua Lima, dapat memberikan fasilitas lebih cepat yang nantinya sebagai penunjang petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya, dapat memberikan penambahan tenaga kebersihan, serta memberikan penataan area pasar agar lebih terorganisir dan kepada Masyarakat sekitar dan para Pedagang agar tidak membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Waste management in the market is an activity that carries out integrated collection, transfer, transportation, and disposal of waste to reduce negative impacts on the environment and the health of the surrounding community. This is because there is still a lack of cleaning staff at the Banua Lima Fish Market, where the market environment is so large that it is not possible for just one person to be a cleaner, inadequate facilities and infrastructure, and lack of public and trader awareness of the cleanliness of the market environment. Based on the above, the study aims to determine the implementation of regional regulation number 16 of 2013 concerning waste management and the factors that influence it. This study uses a qualitative method. In data collection, observation, interviews and documentation are used. Ten people are the sources of data used in the purposive sampling process. After collection, data collection, data display, data condensation and conclusion: drawing/verifying to analyze. The results of the study, which include 15 indicators from 6 variables, show that regional regulation number 16 of 2013 concerning waste management is not good. Three indicators are quite good and twelve indicators are not good out of fifteen indicators. Good implementation such as coordination, cooperation, and political conditions. While for those that are still not good, including the size and objectives of success, human resources and budget resources (financial), firmness, strictness, and toughness, needs, desires, and problems, as well as social and economic

conditions. From supporting factors, namely the establishment of good synergy and understanding and for inhibiting factors, namely the lack of supervision of the market environment and the lack of understanding of the economy and social participation. In order to increase the success of waste processing in the market, it is suggested to the cooperative, small and medium enterprises, industry, and trade services of Hulu Sungai Utara Regency, to be able to provide increased supervision related to sustainability in the Banua Lima fish market, to be able to provide faster facilities which will later support the cleaning staff in carrying out their duties, to be able to provide additional cleaning staff, and to provide arrangement of the market area to be more organized and to the surrounding community and traders so that they do not litter.

Keyword: *Implementation, waste management*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Karena sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Limbah padat hasil aktivitas manusia di bumi disebut sampah. Akibatnya, produksi sampah berkorelasi langsung dengan jumlah penduduk dan pemilik usaha di suatu wilayah serta jenis aktivitas manusia. Sampah dihasilkan dari aktivitas komunal. Sampah adalah produk sampingan yang tidak bisa dihindari dari semua usaha manusia. Beban yang harus ditanggung sebuah kota meningkat seiring dengan ukurannya. Beban yang ditimbulkan oleh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat metropolitan secara keseluruhan adalah salah satunya. Sampah yang tidak dikelola dengan benar dan sungguh-sungguh akan menimbulkan dampak yang sangat parah bagi kota-kota besar, antara lain berpotensi mencemari udara, air, dan tanah serta menimbulkan perubahan keseimbangan lingkungan yang tidak terduga atau merugikan. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus melakukan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Mengelola sampah agar tidak lagi menghasilkan limbah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan tersebut.

Masalah pencemaran lingkungan juga merupakan masalah yang disebabkan oleh banyaknya sampah dan menjadi beban serta permasalahan yang hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota mendapat masalah yang disebabkan oleh sampah yang tidak ditangani dengan baik serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah. Permasalahan sampah sangatlah penting. Mengingat pengaruhnya terhadap banyak aspek kehidupan, sampah sebenarnya bisa dianggap sebagai persoalan budaya. Untuk mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan sampah, upaya harus dikelola secara efektif dan melibatkan semua pemangku kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Di perkotaan di Indonesia, sampah dan pengolahannya menjadi isu yang semakin mendesak. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas penduduk kota, pengelolaan dan pengendalian permasalahan sampah di perkotaan semakin sulit. Meski setiap harinya pasti masyarakat akan menghasilkan sampah, namun masyarakat tidak mau terlalu mengurusinya. Mereka berharap sampah seperti TPS dan truk sampah tidak mengganggu rutinitas mereka sehari-hari. Sampah sendiri mempunyai banyak dampak buruk sehingga hal ini tidak dapat dicegah.

Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di Pasar Ikan Banua Lima, ditemukan fenomena masalah yang peneliti temui, yaitu: Kurangnya tenaga kebersihan pada Pasar Ikan Banua Lima, yang mana lingkungan pasar sangat luas yang tidak memungkinkan hanya 1 orang saja petugas kebersihannya. Sarana dan prasarana yang ada di Pasar Ikan Banua Lima kurang memadai, yang mana hanya memiliki satu gerobak sampah, satu sapu lidi, dan dua tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Untuk tempat sampah tersebut tidak ada pemisah antara sampah organik dan anorganik. Akibatnya terjadi penumpukan sampah dan puing-puing berserakan di sekitar lingkungan. Serta ketidaktahuan masyarakat umum dan pedagang terhadap kebersihan lingkungan. Menimbun sampah dapat merusak estetika lingkungan bila dibuang pada tempat yang tidak semestinya dan tidak ditangani dengan baik, seperti tidak memilahnya terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus Pasar Ikan Banua Lima) dan faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian terdahulu Atika Ariani (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, Program Studi: Administrasi Publik, dengan Judul “Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung)”. Berdasarkan hasil penelitian belum baik terdapat 6 subvariabel dan 14 indikator terdapat 10 indikator belum baik dan 4 indikator cukup baik. Indikator yang cukup baik yaitu tujuan, koordinasi, kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Sedangkan indikator yang kurang baik yaitu ukuran keberhasilan, sumber daya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya waktu pelaksana, organisasi formal, organisasi informal, respon implementor, kognisi permasalahan, kerjasama, dan kondisi politik. Dan Yuliarto Mokodompis, Markus Kaunang, dan Ventje Kasenda (2019) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Jurusan: Ilmu Pemerintahan, dengan Judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado“. Manado merupakan kota dengan jumlah penduduk yang berkembang pesat sehingga berdampak pada pertumbuhan dan persebaran penduduk yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat; semakin banyak orang yang tinggal di suatu wilayah dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan di sana, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Dibuat setiap hari. Dalam hal ini, isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat setempat dikelola dalam ranah kebersihan lingkungan, termasuk isu sampah. Mengelola kebersihan secara efektif merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Manado untuk menjadikan kotanya bersih. Dampak merupakan hal yang dikelola dalam pengelolaan kebersihan. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif di Kota Manado merupakan dampak dari buruknya komunikasi sosialisasi pengelolaan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Mirip dengan kurangnya pengetahuan umum tentang pembuangan sampah yang aman, keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado berhasil dilaksanakan dan mengurangi beban kerja dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang megikutinya. Semua proses kebikan publik saling memengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal merupakan pengertian kebijakan publik (Hayat (2018: 13-14)). Implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Indra Kertati, Harsoyo, Setyohadi Pratomo et al (2023:22)). Dan Tujuannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, lebih spesifiknya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Zuchri Abdussamad, 2021). Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang

digunakan untuk pengumpulan data (Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, 2015). Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 10 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode untuk memilih sumber data dengan tujuan tertentu disebut dengan *purposive sampling* (Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, 2015). Dengan menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016) untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan publik, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan data *collection*, data *display*, data *condensation*, dan *conclusions: drawing/verifying* adalah beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh (Miles, Huberman dan Saldana dalam Siti Fadjarajani, Ely Satiyasih Rosali dkk, 2020). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck* (Sugiyono, 2018).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Ikan Banua Lima)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Faktor yang mempengaruhi suksesnya proses implementasi kebijakan transparansi adalah komunikasi, dimana komunikasi telah berjalan efektif dan didukung pula oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

a. Ukuran keberhasilan

Ukuran keberhasilan adalah suatu pengukur yang di gunakan untuk menilai dan mengukur sejauh mana program atau sistem yang mencapai tujuan yang di tetapkan. Ukuran ini mencerminkan suatu efektivitas dan efisien. Ukuran keberhasilan ini juga penting untuk mengukur dampak suatu program atau sistem yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Ukuran keberhasilan ini juga mengukur tingkat keberhasilan bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Pasar Ikan Banua Lima

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Ukuran Keberhasilan pada indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan petugas kebersihan di Pasar Ikan Banua Lima membutuhkan 2 orang petugas yang mana membersihkan sampah yang ada di Pasar Ikan Banua Lima ini membutuhkan tenaga

yang banyak yang mana Pasar Ikan Banua Lima sangat luas sehingga untuk 1 orang petugas kebersihan saja tidak dapat terselesaikan dengan cepat. Kemudian sarana dan prasarana di Pasar Ikan Banua Lima kurang memadai yang mana itu juga sebagai penghambat kelancaran suatu keberhasilan dalam mengelola sampah dengan baik serta kurangnya kesadaran masyarakat dan para pedagang harus diperhatikan lagi.

b. Tujuan keberhasilan

Tujuan yang dimaksud yaitu agar masyarakat dan para pedagang serta pemerintah mematuhi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah agar di jalankan dengan baik. Tujuan keberhasilan ini juga suatu pencapaian suatu program, kegiatan, atau sistem yang akan memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, para pedagang, dan ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Tujuan Keberhasilan pada indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas kebersihan pada Pasar Ikan Banua Lima yang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 2 orang petugas. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan banyak sampah yang berserakan serta minimnya kesadaran masyarakat dan para pedagang juga dapat menimbulkan banyak sampah yang berserakan sehingga merusak lingkungan pasar.

2. Sumber Daya

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif sangat penting dalam proses penerapan kebijakan. Ketika memutuskan apakah suatu proses implementasi berhasil, sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting. Kehadiran sumber daya manusia yang unggul diperlukan pada beberapa tahapan dari keseluruhan proses implementasi guna memenuhi tugas yang diamanatkan oleh kebijakan yang dirumuskan secara apolitis. Kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan ketika kompetensi dan kemampuan sumber daya tersebut nol. Namun selain sumber daya manusia, waktu dan uang merupakan sumber daya lain yang harus diperhatikan. Sebab, mau tidak mau, akan timbul kesulitan dalam mencapai tujuan kebijakan ketika tersedia sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu, namun dana dari anggaran tidak tersedia. Hal yang sama juga berlaku pada sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia mengerahkan banyak upaya dan dana disalurkan secara efisien, namun dihadapkan pada tenggat waktu yang terlalu ketat, hal ini juga dapat menjadi alasan mengapa suatu kebijakan tidak dilaksanakan.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor agar terjalannya suatu kegiatan yang sudah diperintahkan. Sumber daya manusia dalam proses kegiatan pun tidak cukup untuk satu orang saja. Sumber daya ini pun mencakup orang-orang yang bertugas untuk merencanakan, mengelola, mengimplementasikan, dan mengevaluasi suatu kegiatan sesuai dengan kapasitas, keterampilan, dan kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia pada indikator Sumber Daya

dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan dengan hanya satu orang petugas kebersihan saja tidak bisa cepat dalam membersihkan dan mengelola sampah di Pasar Ikan Banua Lima dengan baik. Yang mana dapat kita ketahui bahwa Pasar Ikan Banua Lima ini sangat luas sehingga dengan hanya satu orang petugas kebersihan dapat membutuhkan banyak waktu dalam membersihkan sampah di Pasar Ikan Banua Lima ini.

b. Sumber daya anggaran (finansial)

Sumber daya anggaran (finansial) suatu alokasi dana atau pembiayaan yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan. Dukungan anggaran pun sangat dibutuhkan untuk penambahan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pada tempat yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Anggaran (finansial) pada indikator Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima kurang baik dalam dukungan anggaran. Hal ini dikarenakan petugas kebersihan di Pasar Ikan Banua Lima membutuhkan sarana pendukung atau pengganti karena apabila sarana yang ada dalam membersihkan sampah di Pasar Ikan Banua Lima yang sudah tidak dapat digunakan maka sarana pendukung yang nantinya digunakan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Baik organisasi resmi maupun informal yang akan terlibat dalam penerapan kebijakan publik menjadi fokus perhatian agen pelaksana. Hal ini penting karena sifat dan kesesuaian agen pelaksana yang sesuai akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan (publik) diimplementasikan. Penerapan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengubah perilaku manusia secara drastis, misalnya, mengharuskan pelaksana proyek bersikap tegas, tegas, dan tegas dalam menerapkan peraturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, ketika memilih agen pelaksana, cakupan atau wilayah pelaksanaan kebijakan harus dipertimbangkan. Jumlah aktor yang berpartisipasi meningkat seiring dengan besarnya pelaksanaan kebijakan.

a. Tegas

Ketegasan merupakan sebuah sikap tegas, konsisten, dan profesional seorang pelaksana dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilakukan. Ketegasan ini mencakup kemampuan seorang pelaksana untuk menjalankan tanggung jawabnya tanpa ragu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Ketegasan agen pelaksana pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima ini kurang baik. Hal ini dikarenakan petugas kebersihan tidak tegas dalam memberitahukan agar para pedagang tidak membuang sampah sembarangan dan untuk pedagangpun ada beberapa yang sadar dalam membuang sampah pada tempatnya atau meletakkan sampah di tempat mereka berjualan saat pasar masih beroperasi.

b. Keras

Keras merupakan suatu sikap atau tindakan seorang pelaksana agar dapat menegur seseorang yang sudah melanggar suatu peraturan. Hal ini dilakukan dengan agar dapat

menjalakn suatu kegiatan dan teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Keras dari segi hal pengawasan pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan petugas kebersihan di Pasar Ikan Banua Lima untuk mengawasi dan menegur kepada para pedagang sudah ada pemberitahuan pada saat pasar belum beroperasi.

c. Ketat

Ketat merupakan suatu sikap atau pendekatan yang disiplin, terstruktur, dan penuh kontrol dalam melaksanakan tugas dengan memastikan semua aturan, prosedur, atau standar dipatuhi secara konsisten. Dengan hal ini aturan yang sudah ditetapkan seorang pelaksana agar dapat mematuhi dan tidak melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Ketat dari segi hal pengawasan pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan bahwa petugas kebersihan di Pasar Ikan Banua Lima tidak ketat dalam pengawasannya meskipun sudah adanya himbauan kepada para pedagang Pasar Ikan Banua Lima untuk tidak membuang sampah sembarangan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

a. Kebutuhan

Kebutuhan merupakan suatu yang di butuhkan pelaksana dalam menjalani suatu kegiatan agar dapat membantu kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Kebutuhan ini juga mencakup kebutuhan fisik, mental, dan profesional yang mendukung kinerja pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancar, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Kebutuhan pada indikator Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan saat keberlangsungan membersihkan dan pengelolaan sampah di Pasar Ikan Banua Lima bahwa sarana pendukung dalam membersihkan dan mengelola kebersihan pada Pasar Ikan Banua Lima masih perlu diganti karena sarana tersebut sudah kurang baik dalam pemakaiannya.

b. Keinginan

Keinginan merupakan suatu harapan yang di inginkan pelaksana yang sangat di butuhkan agar dapat melakukan kegiatan dengan baik. Dengan memenuhi keinginan pelaksana dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pekerja, sehingga mendukung keberhasilan program atau kegiatan yang akan di jalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Keinginan pada indikator Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan bahwa agar adanya pengadaan fasilitas yang lebih memadai dan juga cepat dalam memberikan fasilitas

tersebut serta juga dapat memberikan himbauan terhadap penataan lokasi berdagang di Pasar Ikan Banua Lima ini.

c. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu hambatan masalah yang di hadapi pelaksana dalam melakukan kegiatan di lapangan. Permasalahan juga suatu tantangan yang akan di hadapi pelaksana yang bertugas dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Permasalahan pada indikator Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima kurang baik. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana petugas kebersihan yang kurang memadai sehingga kurang maksimal dalam mengelola sampah di Pasar Ikan Banua Lima.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu yang dijalani oleh pelaksana dengan masyarakat maupun pemerintahan agar berjalan semakin baik, maka suatu kesalahan kecilpun dapat diatasi dengan baik. Dengan koordinasi ini para pelaksana dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Koordinasi pada indikator Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima sudah berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan bahwa petugas pengangkut sampah sudah membersihkan sampah di Pasar Ikan Banua Lima sesuai jadwal yang ditentukan sehingga tidak adanya penumpukan sampah pada pasar tersebut.

b. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu yang sudah ditetapkan dari suatu instansi pemerintahan yang sudah saling berkaitan agar dapat menjalankan kegiatan dengan lebih efisien dan efektif. Kerjasama juga suatu kolaborasi antar dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Kerjasama pada indikator Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan yang mana kerjasama antar petugas kebersihan dengan petugas pengangkut sampah sudah terjalin dengan baik dan untuk kerjasama dengan desa tidak ada karena pengelolaan pasar dibawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan bukan dari Desa.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan merupakan faktor terakhir yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan publik dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi semuanya termasuk dalam

lingkungan yang dipertimbangkan. Selain itu, kinerja implementasi kebijakan yang buruk mungkin disebabkan oleh lingkungan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, upaya penerapan kebijakan juga harus mempertimbangkan lingkungan eksternal yang mendukung.

a. Kondisi sosial

Kondisi sosial merupakan suatu aspek sosial yang mempengaruhi, mendukung, atau menghambat proses pengelolaan sampah pada pasar dan juga suatu kesadaran masyarakat agar paham akan pembuangan sampah pada pasar berbeda tempat dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Dukungan Kondisi Sosial pada indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima masih kurang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di TPS Pasar Ikan Banua Lima sehingga dapat menghambat petugas kebersihan Pasar Ikan Banua Lima dalam membersihkan dan membuang sampah dikarenakan TPS Pasar Ikan Banua Lima sudah berisi dengan sampah masyarakat sekitar Pasar Ikan Banua Lima.

b. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan suatu tingkat bantuan atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung aktivitas pelaksana agar tidak memengaruhi proses pengelolaan sampah baik sekitar pasar, masyarakat, maupun pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Dukungan Kondisi Ekonomi pada indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima masih kurang baik. Hal ini dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana sebagai alat pendukung petugas kebersihan Pasar Ikan Banua Lima dalam menjalankan tugas untuk membersihkan dan mengelola sampah kurang memadai.

c. Kondisi politik

Kondisi politik merupakan suatu faktor yang mempengaruhi maupun mendukung seorang pelaksana, masyarakat, pedagang, maupun pemerintah dalam pengawasan pengelolaan sampah di pasar. Kondisi politik yang baik merupakan landasan penting untuk memastikan keberhasilan program atau kegiatan seorang pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Dukungan Kondisi Politik dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Ikan Banua Lima cukup baik. Hal ini dikarenakan para pedagang harus membayar petugas kebersihan agar dapat membersihkan sampah para pedagang dan para pedagangpun tidak keberatan. Apalagi pemerintah dapat memberikan pengertian terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah ini maka akan berjalan dengan sangat baik karena nantinya para masyarakat dan para pedagang akan mengetahui apa isi dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah ini.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Ikan Banua Lima)

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Ikan Banua Lima):

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu kondisi yang membantu memperlancar, mempercepat, atau meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di pasar ikan banua lima. Faktor pendukung ini juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak dan dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan serta memberikan manfaat tidak hanya bagi kebersihan pasar tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

a. Terjalannya sinergi dan kesepahaman yang baik

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan mengenai faktor pendukung pada Pengelolaan Sampah pada Pasar Ikan Banua Lima Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu bahwa keberhasilan dalam mengelola kebersihan pasar sangat bergantung pada terjalannya sinergi dan kesepahaman yang baik antara semua pihak yang terlibat, termasuk pengelola pasar, petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah, dan bahkan keluarga petugas kebersihan. Koordinasi yang efektif antara pengelola pasar dan petugas pengangkut sampah sangat penting untuk memastikan sampah tidak tertumpuk dan proses pembersihan berjalan dengan lancar. Kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak, jadwal pengangkutan sampah, serta prosedur operasional yang harus diikuti, akan meminimalkan potensi masalah yang dapat mengganggu kebersihan pasar.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu kendala atau masalah yang dapat menghalangi atau memperlambat serta memperlambat upaya pengelolaan sampah secara baik dan teratur di area Pasar Ikan Banua Lima. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat pada pengelolaan sampah di Pasar Ikan Banua Lima dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan lingkungan.

a. Kurangnya pengawasan terhadap lingkungan pasar

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap lingkungan pasar merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kebersihan dan kenyamanan di pasar. Beberapa pihak terkait mencakup pelaksanaan kampanye pada saat pemilu atau pilkada yang tidak mendapatkan izin resmi dari pengelola pasar, yang dapat menyebabkan gangguan seperti kemacetan lalu lintas dan keriuhan, sehingga mengurangi kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar. Selain itu, kondisi cuaca buruk, seperti hujan, serta adanya acara tertentu di sekitar pasar juga menyebabkan keterlambatan dalam proses pembersihan sampah, yang memperburuk keadaan kebersihan pasar. Masalah lain yang muncul adalah perilaku beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah sembarangan, baik di tempat sampah pasar (TPS) maupun di area pasar lainnya. Hal ini meningkatkan volume sampah dan memperlambat proses pengangkutan sampah, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan kebersihan pasar.

b. Kurangnya pemahaman ekonomi dan partisipasi sosial

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Ikan Banua Lima masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya dukungan ekonomi untuk fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta

keterbatasan kapasitas dan kualitas fasilitas yang ada. Fasilitas yang terbatas, seperti tempat sampah yang tidak cukup menampung volume sampah yang besar, dan alat pembersih yang kurang efektif, menghambat efisiensi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan pasar secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang semestinya dan kurangnya kerjasama antara pihak pasar dan petugas kebersihan desa juga menjadi masalah penting. Keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik memperburuk kondisi kebersihan pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, kerjasama yang lebih baik antara pihak pasar dan petugas kebersihan desa, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pasar.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pasar Ikan Banua Lima, yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu: kurang baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator yang sudah cukup baik dan ada beberapa indikator yang kurang baik dalam pelaksanaannya. Adapun kegiatan yang berjalan cukup baik antar lain: *Pertama*, adanya koordinasi dan kerjasama yang berjalan dengan baik yang mana itu sebagai penunjang dalam keberhasilan suatu pengelolaan sampah pada pasar. *Kedua*, adanya retribusi kebersihan atau memberikan iuran kebersihan kepada petugas kebersihan agar mengelola sampah dengan baik. Adapun kegiatan yang kurang berjalan dengan baik antar lain: *Pertama*, Ukuran dan Tujuan Keberhasilan yang belum tercapai dengan baik dikarenakan kurangnya petugas kebersihan serta sarana dan prasarana di Pasar Ikan Banua Lima kurang memadai. *Kedua*, Sumber Daya Manusia atau petugas kebersihan yang masih kurang, karena kawasan pasar sangat luas sehingga membutuhkan petugas kebersihan yang banyak. *Ketiga*, Sumber Daya Anggaran (finansial) kurang maksimal seperti membutuhkannya penambahan petugas kebersihan dan kurangnya fasilitas yang sudah di sediakan dari dinas terkait. *Keempat*, ketegasan pihak pelaksana tidak ada. *Kelima*, pengawasan yang ketat dan keras juga tidak ada karena meskipun para pedagang sudah di himbau terlebih dahulu agar tidak membuang sampah sembarangan tetap saja ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya. *Keenam*, kebutuhan dan keinginan pihak pelaksana kurang baik karena apa yang dibutuhkan oleh pihak pelaksana belum terealisasi pada saat ini. *Ketujuh*, permasalahan yang ada belum terselesaikan dengan dengan baik. *Kedelapan*, keadaan sosial dan keadaan ekonomi yang masih kurang baik, karena tidak adanya dukungan dari pemerintah terhadap keadaan sosial dan keadaan ekonomi ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Ikan Banua Lima) terbagi dua, yaitu: faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya ialah terjalinnya sinergi dan kesepahaman yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya pengawasan terhadap lingkungan pasar dan kurangnya pemahaman ekonomi dan partisipasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Atika Ariani. 2023. *Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di*

Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung). STIA Amuntai: (Sumber dari Penelitian Terdahulu tahun 2022).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*, Malang: Intrans Publishing.
- Indra Kertati, Harsoyo, Setyohadi Pratomo et al. 2023. *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*, Jambi: PT. Sunpedia Publishing Indonesia.
- Leo Agustino. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik edisi revisi*, Bandung: Alfabeta.
- Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Siti Fadjarajani, Ely Satiyasih Rosali dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidispliner*. Ideas Publishing
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Yuliarto Mokodompis, Markus Kaunang, dan Ventje Kasenda. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vo. 13, No.3, hlm 1.
- Zuchari Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press.